

# Bab I

## KONSEP ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

### **Pengertian Administrasi Pendidikan**

Dilihat dari asal katanya, kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu ad + ministrare yang berarti melayani. Dalam arti sempit, pengertian administrasi sama dengan pekerjaan tata usaha (clerical work) seperti : mencatat, mengetik, mengarsipkan, mendokumentasikan, menggandakan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis.

Sedangkan dalam arti luas administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mendayagunakan seluruh sumber-sumber yang tersedia, baik personal maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Kalau kedua pengertian tersebut dikaitkan, jelas bahwa kedudukan administrasi dalam arti sempit akan teranyam dalam pengertian administrasi yang luas. Setiap kerjasama mempunyai proses atau tahapan-tahapan tertentu, misalnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan dan diakhiri dengan penilaian. Setiap kegiatan dalam proses membutuhkan pekerjaan-pekerjaan tata usaha untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Kadang-kadang Kepala Sekolah Dasar sebagai administrator lebih banyak membenamkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan tata usaha sekolah, dan seandainya melupakan tugas utamanya sebagai administrator.

Sebelum membahas tentang pengertian administrasi pendidikan maka hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai UUSPN No. 20 /2003. Untuk lebih jelasnya

disebutkan bahwa “sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pengertian tersebut mengungkapkan beberapa hal yaitu :

1. Sistem Pendidikan nasional merupakan alat sekaligus tujuan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita nasional.
2. Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta menyeluruh dan terpadu.
3. Sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan nasional.

Unsur-unsur penting dalam sistem pendidikan nasional adalah :

1. Sistem pendidikan nasional mempunyai satuan dan kegiatan, artinya lembaga yang berwujud sekolah dan interaksi yang terjadi seperti interaksi dalam proses belajar mengajar.
2. Sistem pendidikan nasional adalah alat dan tujuan dalam mencapai cita-cita pendidikan nasional. Sebagai alat artinya sistem itu merupakan wadah dan sebagai tujuan artinya bahwa sistem pendidikan nasional memberikan rambu-rambu tentang arah dan bagaimana seharusnya pendidikan itu disekolah.
3. Sebagai suatu sistem. Pendidikan nasional mesti dilihat sebagai kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berinterdependen untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan ciri dari sistem pendidikan nasional adalah :
  - a. Berakar pada kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45
  - b. Merupakan suatu kebulatan yang dikembangkan dalam usaha mencapai tujuan.
  - c. Mencakup jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
  - d. Mengatur jenjang kurikulum, penetapan policy, penyelenggara pendidikan.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut, dapatlah dirumuskan pengertian administrasi pendidikan sebagai berikut :

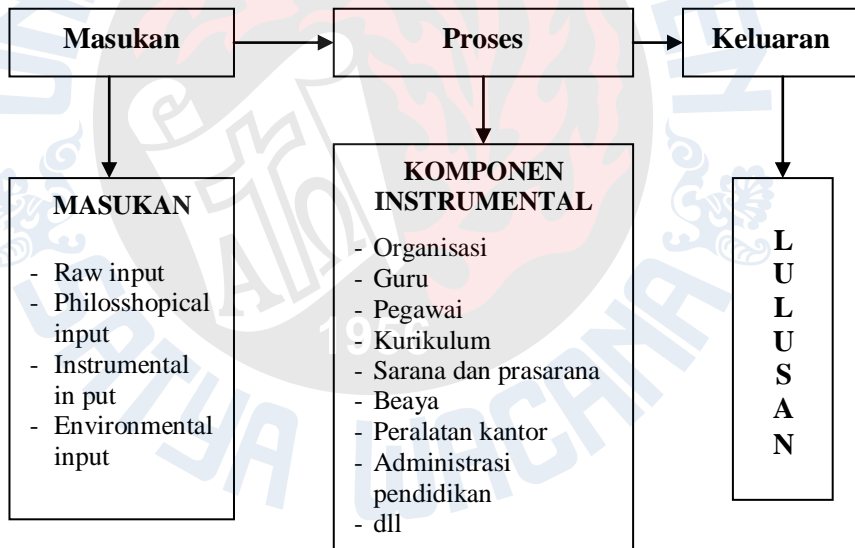
Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih dalam bidang pendidikan dengan mendayagunakan berbagai sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

### **Kedudukan Administrasi Pendidikan dalam sistem pendidikan di sekolah.**

Sekolah merupakan suatu unit yang utuh dalam sistem pendidikan, sekaligus merupakan unit pelaksana teknis dari Depdikbud yang secara langsung menyelenggarakan proses pendidikan atau proses belajar mengajar bagi para siswanya.

Karena itu proses pendidikan di sekolah dapat dilihat sebagai suatu sistem yang utuh, yang terdiri dari : masukan, proses dan luaran.

Untuk jelasnya digambarkan pada skema sebagai berikut :



Dari skema tersebut, jelas bahwa administrasi pendidikan merupakan salah satu komponen dalam proses pendidikan yang beberapa mengelola semua komponen pendidikan, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tujuan administrasi pendidikan berkaitan erat dengan tujuan pendidikan secara umum, sebab administrasi pendidikan pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian pula halnya dengan tujuan administrasi sekolah yang berkaitan erat dengan tujuan sekolah atau kelembagaan. Untuk jelasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28/1990 diaktakan bahwa tujuan pendidikan dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan Sekolah Dasar merupakan bagian dari tujuan pendidikan tersebut. Dalam pp 28/1990 tidak ditemukan tujuan sekolah dasar secara rinci, namun hal tersebut (tujuan Sekolah Dasar) dapat ditemukan dalam kurikulum SD 1975, dan tujuan ini masih relevan untuk dikemukakan, mengingat bahwa tujuan SD mencakup pengembangan kehidupan peserta didik sebagai (1) pribadi, (2) anggota masyarakat, (3) warga negara, (4) anggota umat manusia dan (5) calon peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Secara rinci tujuan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk :
  - a. Memperkuat dasar keimanan dan ketaqwaan
  - b. Membiasakan untuk berperilaku yang baik.
  - c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar
  - d. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
  - e. Memberikan kemampuan untuk belajar
  - f. Membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri.
2. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk :
  - a. Memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat
  - b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan hidup
  - c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warga negara sekurang-kurangnya mencakup upaya :

- a. Mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara RI.
  - b. Menanamkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara.
  - c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota umat manusia mencakup upaya untuk :
- a. Meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
  - b. Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia
  - c. Memberikan pengertian tentang ketertiban dunia
  - d. Meningkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antar bangsa
5. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah dalam menguasai isi kurikulum yang disyaratkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mendayagunakan berbagai sumber (manusia, sarana prasarana serta media pendidikan lainnya) secara optimal, relevan, efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

### **Sudut Tinjauan Dari Administrasi**

Administrasi dapat ditinjau dari 3 segi yaitu :

1. Administrasi ditinjau sebagai suatu gugusan substansi problema-problema khusus di sekolah.
2. Administrasi ditinjau sebagai suatu proses kegiatan manajemen
3. Administrasi ditinjau sebagai sebagai suatu kepemimpinan dan suatu pengaturan tingkah laku manusia.

Ad.1. Administrasi ditinjau sebagai suatu gugusan substansi problema-problema khusus di sekolah.

Ditinjau dari sisi ini, penyelenggaraan administrasi di sekolah meliputi :

- a. Administrasi kurikulum atau pengajaran
- b. Administrasi personalia
- c. Administrasi kesiswaan

- d. Administrasi keuangan sekolah
- e. Administrasi sarana dan prasarana
- f. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.

Uraian lebih lanjut dari ke enam bidang administrasi tersebut akan dibahas pada bab berikutnya.

Ad.2. Administrasi ditinjau sebagai suatu proses kegiatan manajemen Ditinjau dari sisi ini, setiap penyelenggaraan administrasi di sekolah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Ditinjau dari sisi ini, penyelenggaraan administrasi di sekolah meliputi :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur perencanaan adalah (1) tujuan (2) kebijakan (3) prosedur (4) kemajuan (5) program.

Perencanaan pendidikan di SD dapat dibedakan atas beberapa golongan :

- (1) menurut waktunya terdiri dari :
  - perencanaan jangka pendek
  - perencanaan jangka menengah
  - perencanaan jangka panjang
- (2) menurut timbulnya terdiri dari :
  - perencanaan dari bawah
  - perencanaan dari atas
- (3) menurut besarnya terdiri dari :
  - perencanaan mikro
  - perencanaan meso
  - perencanaan makro
- (4) menurut pendekatannya terdiri dari :
  - perencanaan terpadu
  - perencanaan terserai
- (5) menurut program, terdiri dari :
  - perencanaan komprehensif
  - perencanaan tambal sulam

- (6) menurut pelakunya, terdiri dari :
- perencanaan individu
  - perencanaan kelompok
  - perencanaan lembaga

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

- 1). Organisasi itu mempunyai tujuan yang jelas
- 2). Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap anggota organisasi
- 3). Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
- 4). Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi
- 5). Adanya kesatuan perintah
- 6). Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
- 7). Adanya pembagian tugas yang jelas.
- 8). Struktur organisasi disusun sederhana mungkin
- 9). Pola dasar organisasi, harus relatif permanen
- 10). Adanya balas jasa yang setimpal yang diberikan kepada setiap anggota organisasi.
- 11). Penempatan orang, hendaknya sesuai dengan kemampuannya.

c. Penggerakkan

Penggerakkan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Sondang Siagian 1979).

Dalam pengertian terkandung pula maksud memberi penjelasan, petunjuk, pertimbangan, bimbingan kepada para petugas, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal untuk tercapainya tujuan.

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena menyangkut hubungan manusia dengan manusia dalam soal mempengaruhi. Pada tahap inilah kemampuan seorang pemimpin diuji keampuannya.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan pengawasan adalah :

- 1). Pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- 2). Pelaksanaan tugas sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan.
- 3). Kesulitan serta kelemahan kerja dapat dicegah, ditanggulangi atau dikurangi.
- 4). Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif.

Prinsip-prinsip pengawasan adalah :

- 1). Prinsip organisasi, yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan selektif pada tiap organisasi. Kewajiban mengawasi harus dilaksanakan oleh setiap kepala dan hasilnya harus dilaporkan kepada atasan.
- 2). Prinsip perbaikan dan penyempurnaan, kegiatan pengawasan berusaha menemukan penyebab kesalahan dan cara bagaimana memperbaikinya demi tercapainya hasil yang lebih baik dan sempurna sesuai dengan tujuan.
- 3). Prinsip komunikasi, kegiatan pengawasan berfungsi sarana hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan, sehingga tercapai pendekatan pribadi serta terpujuk rasa kepercayaan dan kerja sama yang baik.
- 4). Prinsip pencegahan, kegiatan pengawasan harus mampu melekat jauh ke depan, sehingga menghindarkan adanya kemungkinan salah arus.
- 5). Prinsip pengendalian diri, kegiatan pengawasan harus mampu memberikan bimbingan teknis administratif dan operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



- 6). Prinsip obyektifitas dan keterbukaan, kegiatan pengawasan harus dilakukan secara obyektif, tanpa rasa sentimen, sehingga hasil pengawasan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka.

Pengawasan yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Fact finding artinya menemukan fakta tanpa mengadakan generalisasi.
- 2). Disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- 3). Fleksibel
- 4). Menyeluruh
- 5). Ekonomis dengan hubungan beaya
- 6). Obyektif
- 7). Membawa tindakan perbaikan

e. Penilaian

Penilaian menurut Ensiklopedi Administrasi adalah menetapkan perbedaan antara hasil yang benar-benar dapat dicapai dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dicapai menurut rencana, serta menilai perbedaan-perbedaan tersebut. Berdasarkan penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pada hakekatnya penilaian tersebut merupakan :

- 1). Ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan pada fase pelaksanaan.
- 2). Bersifat korektif terhadap fase telah selesai dikerjakan.
- 3). Bersifat prescriptive, artinya sesuatu yang bersifat mengobati.
- 4). Ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya.

Penilaian mencakup unsur-unsur manusia, material keseluruhan perencanaan yang sudah dibuat, dan penilaian keseluruhan bidang kegiatan pelaksanaan.

Adapun langkah-langkah dalam proses penilaian adalah sebagai berikut:

- 1). Harus ada penentuan dan perumusan tujuan.
- 2). Perlu memperinci tujuan-tujuan menjadi pokok-pokok yang konkrit dan terbatas.
- 3). Memilih alat dan teknik penilaian yang tepat.

- 4). Pengumpulan data.
- 5). Menganalisa dan pengambilan kesimpulan
- 6). Diagnosa dan tindak lanjut

Ad.3.Administrasi ditinjau sebagai suatu kepemimpinan dan pengaturan tingkah laku manusia.

Seorang pemimpin adalah juga seorang administrator. Karena pekerjaan administrasi adalah pekerjaan pemimpin, maka administrasi dapat ditinjau dari segi kepemimpinan dan tingkat laku daripada orang-orang yang dipimpin.

Kepemimpinan atau hal pemimpin pada umumnya diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengambil inisiatif dan mempengaruhi orang lain yang terikat dalam suatu organisasi formal agar mau dan suka bekerjasama secara efektif dan efisien demi pencapaian tujuan.

Dalam pengertian tersebut terdapat dua pihak dalam setiap proses kepemimpinan yaitu: pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin. Hubungan antara kedua pihak, haruslah merupakan suatu hubungan kerjasama yang serasi yang dapat dianalogikan sebagai hubungan kepala dan badan yang satu tak dapat ada dan berfungsi tanpa yang lain.

Hubungan kemanusiaan dimaksud, mencakup hubungan formal dan hubungan informal. Dan kepemimpinan yang sukses harus dimulai atas dasar hubungan kemanusiaan yang harmonis.

Untuk itu, dari pihak pemimpin dituntut untuk harus memiliki inisiatif dan mampu mempengaruhi bawahan, dan ini hanya mungkin jika para pemimpin memiliki kelebihan-kelebihan.

Tanpa memiliki kelebihan-kelebihan, agak sulit bagi seorang pemimpin untuk dapat mengambil inisiatif dan mempengaruhi bawahan. Kelebihan-kelebihan dimaksud dapat diperoleh lewat pengalaman dengan cara belajar terus menerus, selain kelebihan-kelebihan yang interes dalam diri seorang pemimpin.

Seorang pemimpin yang berpengalaman dan berpengetahuan luas serta ahli dan trampil dalam tugas jabaannya akan memiliki daya dorong yang kuat dalam mempertinggi semangat kerja dari para bawahannya. Sikap cela mencela, serta tuduh menuduh antara sesama staf guru dan kepala sekolah (misalnya) merupakan suatu ciri suasana kepemimpinan yang “human behaviour” yang buruk di sekolah.

Demikian pula sikap suka membocorkan rahasia jabatan serta sikap pemimpin yang selalu mengeluh pada atasan tingkah laku bawahannya, adalah suatu ciri ketidakmampuan dalam hal memimpin. Untuk mengatasi semua itu, sikap kerja kepemimpinan yang demokratis atas dasar hubungan kemanusiaan yang harmionis perlu dikembangkan.

